



DISKRIMINASI TERHADAP MASYARAKAT PAPUA DI TENGAH MULTIKULTURALISME

¹Aurellia Shinta Purnamasari, ²Soni Akhmad Nulhaqim, ³Windy Dermawan

¹Program Studi Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung

Email korespondensi: aurellia19003@mail.unpad.ac.id

²Program Studi Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung

³Program Studi Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung

Received 1 Juni 2023; Revised: 1 November 2023; Accepted: 2 November 2023; Published: November 2023; Available online: November 2023

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara multikulturalisme yang kaya akan keberagaman ras, suku, budaya, agama, dan lain-lain. Meski telah puluhan tahun merdeka, di era modernisasi, sikap rasisme dan diskriminasi terhadap masyarakat Papua masih ditemui. Stereotipe negatif yang dipercayai masyarakat seolah menjadi peraturan tidak tertulis yang dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini pada akhirnya mengarah pada konflik sosial yang mengganggu stabilitas dan keamanan nasional. Penulis ingin menganalisis konflik secara mendalam dan menemukan resolusi konflik yang relevan dalam sudut pandang teori kesalahpahaman antarbudaya dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik sosial yang terjadi pada masyarakat Papua diakibatkan oleh perbedaan norma, budaya, dan tradisi yang akhirnya menghasilkan ketidakcocokan dalam cara berkomunikasi. Permasalahan tersebut menjadi berkepanjangan karena resolusi konflik yang digunakan belum memanfaatkan unsur pendidikan, kolaborasi, dan pendekatan budaya.

Kata Kunci: Diskriminasi, Konflik Sosial, Multikulturalisme, Papua

PENDAHULUAN

Multikulturalisme dipahami sebagai pengakuan bahwa masyarakat memiliki kemajemukan, sekaligus komitmen untuk mengakui keberagaman sebagai ciri utama masyarakat tersebut (Harto, 2014). Multikulturalisme merupakan suatu realitas sosial dalam kehidupan, khususnya di Indonesia yang

memegang teguh prinsip “Bhinneka Tunggal Ika” dengan keberagaman suku, budaya, dan ras yang dimiliki. Yewangoe (2002) mengatakan bahwa multikulturalisme yang ada di Indonesia sepatutnya disyukuri, meskipun juga akan menjadi sebuah tantangan.

Hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat majemuk

memiliki peluang untuk menimbulkan suatu konflik sosial (Elly, 2011). Konflik sosial merupakan fenomena yang kompleks. Costarelli (2006) menelaah beberapa faktor penyebab konflik antar kelompok, yakni permasalahan ekonomi, psikologis, sejarah perbedaan budaya, hingga dalam aspek politik. Sejatinya, konflik sosial menjadi hal yang lumrah ditemui dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, ketidakadilan sosial, perbedaan kelas, dan ketidakseimbangan kekuasaan antar kelompok menjadikan konflik semakin intens.

Multikulturalisme yang disalahartikan mengarah pada permasalahan komunal dan konflik yang berkepanjangan, salah satunya konflik Papua yang hingga saat ini belum terselesaikan, bahkan mengalami cenderung mengescalasi. Keberadaan masyarakat Papua kerap dilihat sebagai suatu ancaman oleh masyarakat lokal dimanapun mereka berada, sebagaimana kasus pengepungan di Yogyakarta yang turut menunjukkan represifitas aparat dan ormas. Perilaku diskriminasi terhadap masyarakat Papua dalam berbagai kehidupan seolah menjadi fenomena yang wajar dijumpai, bahkan di ajang unjuk bakat di mana model asal Papua mendapat perilaku diskriminasi di ajang Puteri Indonesia.

Adanya konflik sosial tersebut disebabkan oleh prasangka yang melibatkan nilai subjektif dalam suatu interaksi sosial. Selama ini, konflik

antar kelompok sedikit banyak dilihat melalui perspektif individu, sehingga tidak ditemukan pola penanganan yang relevan dan malah mengaburkan pokok permasalahan. Fenomena ini dapat dilihat realisasinya dalam kasus diskriminasi masyarakat Papua di beberapa wilayah di Indonesia yang tak kunjung berkesudahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mendalami konflik sosial yang terjadi pada masyarakat Papua di beberapa wilayah. Penelitian ini akan dianalisis melalui teori kesalahpahaman antarbudaya yang melihat konflik sebagai ketidakcocokan gaya komunikasi antar kelompok. Sebelumnya, konflik akan dianalisis menggunakan alat bantu analisis konflik, meliputi peristiwa konflik, pemicu konflik, penyebab konflik, dampak konflik, serta resolusi konflik. Adapun tujuan dari tulisan ini adalah untuk memperoleh kumpulan data dan informasi yang runtut berkenaan dengan konflik dan resolusi konflik, serta berkontribusi dalam keilmuan dinamika sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh atas permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini digunakan dalam upaya menggali secara dalam suatu fenomena konflik sosial yang terjadi, menurut aspek pemicu, penyebab, dampak, serta

resolusi konflik. Adapun data yang digunakan merupakan data sekunder, seperti jurnal dan karya ilmiah yang memiliki korelasi dengan topik penelitian. Data tersebut diperoleh melalui studi literatur. Setelah memperoleh data penelitian, penulis akan melakukan analisis data melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk kemudian di uji keabsahannya dengan proses triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Konflik

Pada 15 Juli 2016, mahasiswa Papua yang berkumpul di asrama Papua Yogyakarta dikepung, ditakuti dengan suara tembakan dan lemparan gas air mata, beberapa motor milik mahasiswa dirusak. Suara mahasiswa dibungkam dan dicemooh dengan kata-kata rasis. Obby Kogoya, bagian dari mahasiswa Papua, bahkan dikriminalisasi dan dipenjara dengan dakwaan melawan aparat keamanan. Fenomena tersebut bukan yang pertama kali. Sejak Januari 2016, pengepungan terjadi hampir setiap bulan, diikuti dengan berbagai tindakan represif dan intimidasi.

Pengepungan asrama Papua pertama terjadi pada 26 April 2016, bertepatan dengan penyelenggaraan pentas seni dan budaya untuk memperingati hari kematian seorang budayawan Papua, Arnold C. A. Di malam sebelum kegiatan dimulai, terdapat seseorang yang mengaku intelijen dan mengintimidasi mereka.

Keesokannya, puluhan aparat mengelilingi bagian depan dan samping asrama di Jalan Kusumanegara I Yogyakarta dengan atribut dan senjata yang lengkap. Tidak hanya itu, mereka juga membawa 7 truk Dalmas, 4 unit mobil Sabara, dan puluhan motor Brimob. Penghuni asrama akhirnya tidak dapat menjalani aktivitas seperti biasa, namun acara peringatan tetap berjalan dengan aman.

Kejadian kembali terulang pada 2 Mei 2016 dan 31 Mei 2016 dalam acara mimbar bebas sebagai bentuk solidaritas Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) agar menjadi bagian dari Melanesian Spearhead Group (MSG) dengan dalih adanya perintah Kapolri terkait pengamanan nasional. Pengepungan masih terus terjadi dalam beberapa acara, seperti peringatan hari Musa Mako Tabuni yang ditembak mati militer Indonesia pada 14 Juni 2016, hingga peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan Papua pada 1 Juli 2016. Namun, pengepungan tersebut senyap dari pemberitaan media massa.

Keadaan semakin panas mulai 13 Juli 2016, dimana organisasi masyarakat mulai melibatkan diri, ditambah dengan penambahan personel dari aparat keamanan beserta senjata dan mobil water cannon. Puncaknya, pada tanggal 15 Juli 2016 saat ratusan mahasiswa berkumpul dalam rangka mendukung ULMWP untuk menjadi anggota penuh MSG di Honiara, Kepulauan Solomon, mereka

dianiaya dan tidak diperbolehkan keluar asrama, bahkan untuk membeli makanan, diiringi dengan teriakan rasis “monyet Papua”. Secara terpisah, di Malang, Jawa Timur, polisi menangkap 26 mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang beraksi menuntut referendum di depan Balai Kota Malang.

Konflik ini berawal ketika saat sekumpulan mahasiswa Papua berunjuk rasa dan menggaungkan kebebasan bagi Papua Barat. Aksi demonstrasi terkait kebebasan yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat Papua ternyata mendapat respon dari pemerintah, ormas, dan aparat kepolisian serta TNI di Yogyakarta. Tindakan masyarakat dan mahasiswa Papua saat itu pada akhirnya memicu reaksi balik dari ormas dan pemerintah Yogyakarta terlebih saat gubernur, Hamengku Bowono mengatakan bahwa kelompok separatisme harusnya angkat kaki dari bumi keraton. Bersamaan dengan itu, pihak kepolisian dan TNI bersama ormas seperti FKPPPI, Pemuda Pancasila, Faksi kraton turun untuk menghalangi aksi yang akan dilakukan oleh mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua (IPMIPA).

Esau, Wakil Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) Yogyakarta menambahkan bahwa diskriminasi terjadi di semua kalangan,

bahkan pelajar di sekolah. Terdapat pelajar yang terancam dikeluarkan dari sekolah karena ia menganyam rambutnya. Sikap intoleran terhadap budaya ataupun kebiasaan yang berbeda dari mayoritas menjadikan masyarakat Papua sulit diterima bahkan dalam lingkungan sekolah. Pada tahun 2022, sebuah keributan pecah di asrama mahasiswa Papua Yogyakarta dan merenggut satu nyawa. Korban dihadang oleh sejumlah orang saat akan keluar asrama, kemudian terjadi penganiayaan menggunakan senjata tajam.

Konflik di asrama mahasiswa Papua Kamasan I ini sejatinya juga merupakan akumulasi dari beberapa konflik laten sebelumnya, termasuk bentrok individu maupun kelompok antara mahasiswa Papua dengan warga lokal yang bersikap intoleran, khususnya ormas dan aparat keamanan.

Diskriminasi terus berlanjut sampai saat ini. Banyak mahasiswa Papua yang kesulitan mencari indkos di sekitaran kampus. Mereka selalu ditolak dengan berbagai alasan. Kalaupun diterima, mahasiswa Papua dibebani dengan persyaratan yang rumit dan sulit dipenuhi, seperti fotokopi Kartu Keluarga dari wali yang bukan merupakan orang Papua. Tidak sedikit mereka yang menyerah, sehingga harus merogoh kocek lebih dalam untuk mengontrak satu rumah padahl hanya ditinggali seorang diri. Mereka juga rela jalan jauh menuju

kampus, karena indekos yang menerima mereka sangat terbatas. Tidak sedikit dari mereka yang bahkan diusir dari indekos tanpa alasan.

Presiden Mahasiswa Papua DIY, Aris Yeimo menambahkan bahwa diskriminasi juga terjadi dalam timpangnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang melibatkan mahasiswa Papua. Bila orang Papua yang menjadi korban, perkara tak pernah diusut hingga tuntas. Namun jika orang Papua jadi pelaku kejahatan, kasus begitu cepat ditangani.

Finalis Puteri Indonesia, Olvah Alhamid, perempuan asal Timika yang merupakan model dan motivational speaker pernah menjadi korban perundungan. Ia dicemooh karena penampilan fisik dan warna kulitnya. Sejak itu, prestasi akademis dan kepercayaan dirinya merosot. Namun, ia berhasil kembali bangkit. Ia masih tidak memercayai bahkan setelah puluhan tahun merdeka, rasisme dan diskriminasi masih melekat di masyarakat.

Wujud diskriminasi mahasiswa Papua di berbagai wilayah merupakan wujud dari diskriminasi ras mulai dari pengepungan, penolakan serta pengusiran dari indekos, kata-kata rasialis, pengucilan, perbuatan merendahkan, pandangan tidak manusiawi, represifitas aparat dan pembatasan hak-hak berpendapat kepada orang - orang Papua. Secara fisik, masyarakat Papua terlihat hitam sehingga stigma negatif tersebut

semakin melekat. Padahal, yang berbuat onar tidak hanya orang Papua, walaupun orang papua, tidak semua orang Papua yang ada di Yogyakarta berbuat onar dan mabuk - mabukan. Konflik laten antara masyarakat Papua dengan ormas dan aparat keamanan akhirnya menjelma menjadi konflik manifest. Konflik kedua pihak dianggap serius karena telah mengganggu stabilitas keamanan dan integrasi nasional, utamanya dalam sudut pandang hak asasi manusia.

Analisis

Berdasarkan gambaran konflik sebelumnya, diketahui bahwa selama beberapa tahun terakhir, stigmatisasi terhadap mahasiswa Papua memang semakin kental. Didukung dengan realita bahwa sebelum - sebelumnya, telah banyak konflik yang terjadi antara pihak Papua dengan ormas dan aparat keamanan di Yogyakarta atau bahkan di daerah lain. Penolakan dan diskriminasi masyarakat lokal terhadap masyarakat Papua seolah melekat dan menjadi peraturan yang tidak tertulis. Hal ini dikarenakan adanya prasangka dan melekatnya stereotype bahwa mereka tidak tertib dan suka membuat onar. Penolakan yang ada mengakibatkan masyarakat Papua yang tadinya ingin menjalin relasi dengan komunitas di luar orang Papua berujung menemui kebuntuan. Masyarakat Papua akhirnya kembali berkumpul dengan sesamanya. Realita tersebut pada akhirnya semakin mempertebal stereotype yang berlaku.

Dalam aspek penyebab konflik, adanya kesenjangan ekonomi, sosial, budaya, dan politik memperparah kesalahpahaman antarbudaya. Secara ekonomi, mahasiswa Papua yang merantau ke Yogyakarta memiliki sifat yang beragam. Beberapa diantara mereka boros untuk memenuhi gaya hidup, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Masyarakat lokal merasa tersaingi secara perekonomian dan memiliki rasa khawatir mengenai keterbatasan lapangan pekerjaan akibat jumlah penduduk dari Papua di Yogyakarta yang terus bertambah. Namun, beberapa lainnya malah susah membayar bulanan indekos. Hal ini turut menjadi alasan induk semang menolak mahasiswa Papua. Mereka tidak ingin arus pemasukan uang sewa bulanan indekos terganggu.

Secara sosial, pandangan umum menganggap orang Papua kerap melanggar norma dan peraturan, hingga berkelahi. Tidak dapat dipungkiri bahwa budaya yang melekat pada masyarakat Papua bertolak belakang dengan budaya masyarakat Yogyakarta. Kultur Papua yang keras dan tegas bertolak belakang dengan kultur Jawa yang rumit dan penuh rasa menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi mahasiswa Papua yang ingin mencoba hidup berdampingan dengan masyarakat lokal tempat mereka merantau. Selain itu, wujud adaptasi mahasiswa Papua masih terbatas pada lingkungan ingroup atau sesama orang Papua. Mereka membangun kenyamanan tinggal di

Yogyakarta dengan pengerasan dan reproduksi identitas daerah asal mereka seperti menganyam rambut, memakai tas noken, bakar batu atau memasak bersama dengan api unggun, serta menggunakan bahasa Papua.

Padahal masyarakat lokal juga perlu menyadari realita bahwa perbedaan kondisi geografis membentuk keseharian orang Papua. Orang Papua terbiasa tinggal di tempat dingin, seperti pegunungan sehingga butuh penghangat badan, termasuk alkohol. Oleh karena itu, butuh waktu untuk beradaptasi ketika harus merantau di tempat lain. Terakhir, kondisi politik Papua rupanya berpengaruh terhadap aktivitas mahasiswa Papua di Yogyakarta, termasuk aksi unjuk rasa dan lain sebagainya. Adanya ragam tipologi mahasiswa, meliputi mahasiswa politis, moderat dan apatis pada akhirnya turut memengaruhi pembentukan stereotipe dan pandangan masyarakat lokal.

Dinamika kehidupan mahasiswa Papua di Yogyakarta merupakan suatu fenomena benturan identitas yang berujung pada krisis hubungan sosial. Padahal, orang Papua generasi pertama yang merantau ke Yogyakarta dulunya terbilang memiliki privilese. Banyak di antara mereka yang dijadikan sebagai centeng atau preman di daerah tempat mereka tinggal. Ernawati, mewakili Forum Solidaritas Yogya Damai dalam CNN Indonesia menambahkan bahwa

mereka diberi banyak keleluasaan dan dipercaya sebagai penjaga kafe atau tempat tertentu. Seiring menguatnya posisi orang Papua di Yogyakarta, muncul kecemburuan sosial dari masyarakat lokal. Status orang Papua tampak semakin tinggi, sedangkan masyarakat lokal semakin sulit mencari pekerjaan ditambah dengan desakan pengusaha dari Jakarta yang merambah ke Yogyakarta. Perubahan besar terjadi ketika beberapa orang Papua dihabisi dalam kasus Cebongan.

Kasus cebongan merupakan peristiwa penembakan terhadap empat tahanan Lapas Cebongan pada 23 Maret 2023 oleh Kopassus. Saat itu, terjadi razia dan sweeping yang menimbulkan ketakutan massal di kalangan orang timur. Kejadian tersebut menjadi titik balik redupnya kejayaan orang Papua di Yogyakarta. Organisasi masyarakat yang intoleran pada akhirnya kembali berjaya dan merasa perlu “mengamankan” kotanya dari orang - orang timur dan menimbulkan konflik.

Konflik yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki dampak signifikan. Secara umum, konflik sosial yang tidak berkesudahan menandakan ketidakmampuan negara untuk menciptakan situasi yang aman dan stabil. Hal ini tentu akan menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah, termasuk pariwisata dan perdagangan.

Konflik yang terjadi juga menimbulkan ketegangan sosial.

Kehadiran polisi lengkap dengan senjata dan armada tanpa alasan yang jelas turut menimbulkan keresahan dan mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar asrama. Ketegangan yang ada secara tidak langsung memengaruhi stabilitas sosial di wilayah tersebut, bahkan berpotensi menciptakan distansi yang lebih jauh antara masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya risiko konflik yang lebih luas dan dapat membahayakan stabilitas nasional. Konflik sosial yang berkepanjangan dapat dimanfaatkan oleh kelompok ekstrimisme untuk menggerakkan agenda mereka.

Ditambah dengan adanya keterlibatan aparat keamanan, pihak eksternal akan semakin menyoroti permasalahan ini karena khawatir akan adanya pelanggaran hak asasi manusia. Selain merusak citra Indonesia sebagai negara yang plural dan demokratis, hal tersebut turut berdampak pada merosotnya citra polisi yang seharusnya sebagai aparat penegak hukum yang melindungi dan mengayomi masyarakat, namun malah menjadi perantara terjadinya konflik sosial berbasis diskriminasi dan rasisme, serta melanggar HAM secara sistematis. Mereka pada akhirnya merespon dengan membentuk relasi distansi dan kolaborasi sebagai strategi adaptasi agar mampu bertahan dari permasalahan stigmatisasi atas identitas etnis Papua di Yogyakarta. Bukan tidak mungkin, bagi masyarakat Papua untuk menuntut dan

memunculkan kembali gerakan pemisahan diri apabila sikap rasisme dan diskriminasi ini terus berlanjut.

Dibutuhkan pendekatan budaya untuk menyelesaikan konflik sosial yang terjadi kepada masyarakat Papua. Adapun resolusi konflik yang dapat ditawarkan, termasuk dengan tetap mengedepankan dialog, pemahaman, dan toleransi antar kelompok masyarakat. Perbedaan tradisi dan budaya memerlukan setiap pihak untuk mengedepankan hati dan empati. Hal ini dirasa akan berdampak signifikan untuk menekan eskalasi konflik. Kemudian, inisiatif bagi pelajar ataupun mahasiswa Papua dengan masyarakat lokal perlu terus diupayakan, meskipun sangat sulit. Diperlukan aktivasi modal kultural melalui political will dari pemerintah itu sendiri. Selain itu, perlu adanya peningkatan efektivitas komunikasi antar budaya untuk menepis stereotipe yang berlaku. Terakhir, pemerintah perlu merancang berbagai program kolaboratif untuk menambah pengetahuan dan wawasan, utamanya kepada pihak yang berkonflik mengenai keberagaman budaya yang ada.

KESIMPULAN

Melalui pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik sosial yang terjadi antara masyarakat Papua dengan masyarakat lokal di berbagai wilayah disebabkan oleh perilaku rasisme dan diskriminasi yang

berkepanjangan. Perbedaan norma, budaya, dan tradisi menghasilkan ketidakcocokan dalam cara berkomunikasi, sehingga menjustifikasi stereotipe yang telah melekat di kehidupan bermasyarakat. Hal ini juga berdampak pada aspek lain yang lebih luas. Proses interaksi yang melibatkan beberapa individu atau kelompok memang memiliki dua ujung, yakni integrasi atau malah konflik.

Konflik terkadang dibutuhkan untuk menciptakan perubahan tatanan di masyarakat. Melalui beberapa resolusi konflik yang dicantumkan, diharapkan agar konflik sosial yang terjadi dapat menyadarkan masyarakat mengenai multikulturalisme, khususnya di era modernisasi saat ini yang seharusnya sudah tidak lagi ditemui sikap rasisme dan diskriminasi. Menjadi pendatang menuntut masyarakat Papua untuk dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat lokal, baik secara fisik, sosial, dan kultural untuk dapat diterima dengan baik. Namun, pengertian harus muncul dari kedua belah pihak yang berkonflik untuk dapat hidup berdampingan. Jika dibiarkan terus menerus, gesekan yang ada malah berpotensi memicu konflik yang lebih besar dan mengganggu stabilitas dan keamanan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

BBC News Indonesia. (2016). *Mereka tidak menerima kos untuk anak Papua*. https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/07/160714_trenso_sial_papua

- Berlianto, H. B. (2023). Upaya Hukum Penghapusan Diskriminasi dan Rasisme Terhadap Masyarakat Asli Papua. *Comseroa: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(10), 2209–2222. <https://doi.org/10.36418/comseroa.v2i10.631>
- Farid, D. (2021). *Kisah Finalis Puteri Indonesia Hadapi Rasisme*. DW Global Media Forum. <https://www.dw.com/id/olvah-alhamid-dari-papua-barat-bicara-tentang-diskriminasi-dan-rasisme/a-59181747>
- Florene, U. (2016). *Kronologi tindakan represif terhadap mahasiswa Papua di Yogyakarta*. Rappler.Com. <https://www.rappler.com/world/indonesia/140261-kronologi-represi-aparat-papua-yogyakarta/>
- Idham, M. S. M. (2023). *Menyoal Indekos di Yogyakarta yang Kerap Menolak Mahasiswa Papua*. Tirto.Id. <https://tirto.id/menyoal-indekos-di-yogyakarta-yang-kerap-menolak-mahasiswa-papua-gDsc>
- Jalaluddin Hasibuan. (2022). Distingsi Pengelolaan Konflik Papua Yang Tidak Pernah Selesai. *Asketik*, 6(1), 69–84. <https://doi.org/10.30762/asketik.v6i1.189>
- Kurniawan, S. (2016). Diskriminasi Mahasiswa Papua di Yogyakarta. *Academia.Edu*, 1–13. https://www.academia.edu/37805820/Diskriminasi_Mahasiswa_Papua_di_Yogyakarta
- Kusumadewi, A. (2016a). *Kisah Mahasiswa Papua di Yogya Dua Hari Terkurung di Asrama*. CNN Indonesia.
- Kusumadewi, A. (2016b). *Resah Hati Orang Papua di Tanah Yogya*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160808201633-20-150014/resah-hati-orang-papua-di-tanah-yogya>
- Mahyuddin, & Najib, M. (2018). *Dinamika Multikulturalisme Mahasiswa Papua di Yogyakarta* [Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/157793>
- Masyitoh, M. (2017). *ADAPTASI MAHASISWA PAPUA DI YOGYAKARTA* [Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/116993>
- MN, N. (2009). *Peranan Manajemen Konflik dalam Organisasi* (pp. 99–109). *Jurnal Manajemen*.
- Noor, T. R. (2020). Menepis Prasangka Dan Diskriminasi Dalam Perilaku Beragama Untuk Masa Depan Multikulturalisme Di Indonesia. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 210–222. <https://doi.org/10.25217/jf.v5i2.1058>
- Nulhaqim, S. A., Irfan, M., & Wandu, A. (2011). STUDI KASUS: DI DESA ERETAN WETAN KECAMATAN KANDANGHAUR KABUPATEN INDRAMAYU. *Jurnal Universitas Padjajaran*, 15.
- Nurrachman, E. L. (2022). *POLITIK IDENTITAS DAN TERBENTUKNYA STEREOTIPE MASYARAKAT YOGYAKARTA*

- TERHADAP MAHASISWA PAPUA. *Universitas Siliwangi*. <http://repositori.unsil.ac.id/7684/>
- Pangaribowo, W. S. (2022). *Keributan Pecah di Asrama Mahasiswa Papua Yogyakarta, Satu Orang Tewas*. Kompas.Com. <https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/08/24/115018978/keributan-pecah-di-asrama-mahasiswa-papua-yogyakarta-satu-orang-tewas?page=all>
- Rumagit, S. K. (2013). Kekerasan dan Diskriminasi Antar Umat Beragama di Indonesia. *Lex Administratum*, 1(2), 56–65.
- Saputra, M. N. A. (2020). Diskriminasi terhadap Masyarakat Papua Ditinjau dari Teori Konflik. *Universitas Widya Mandala Surabaya*.
- Sulaeman. (2017). *Konflik Sosial Mahasiswa Papua di Yogyakarta. FISIP Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Susanto, H. (2022). *Kisruh Berujung Maut di Asrama Mahasiswa Papua Jogja, 2 Orang Menyerahkan Diri*. Detik.Com. <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6254034/kisruh-berujung-maut-di-asrama-mahasiswa-papua-jogja-2-orang-menyerahkan-diri/2>
- Tebai, B. (2018). *15 Juli: Hari Diskriminasi Terhadap Mahasiswa Papua dalam Keistimewaan Yogyakarta*. Suara Papua. <https://suarapapua.com/2018/07/17/15-juli-hari-diskriminasi-terhadap-mahasiswa-papua-dalam-keistimewaan-yogyakarta/>